

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Website Aplikasi e-Makaryo (AyoKerjo) sebagai layanan tata kelola ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkan bahwa

1. Website Aplikasi ini mengalami polarisasi efektivitas: sangat berhasil pada tataran operasional dan administratif, namun belum mencapai hasil yang diharapkan pada tataran strategis. Secara operasional, e-Makaryo sukses bertransformasi menjadi instrumen birokrasi digital yang memfasilitasi pelayanan dasar (seperti pembuatan kartu AK-1) dengan cepat, efisien, *paperless*, dan *mobile-friendly*. Berdasarkan indikator efektivitas menurut John P. Campbell, beberapa aspek menunjukkan hasil yang cukup baik, terutama pada indikator keberhasilan program dan kepuasan pengguna yang terlihat dari kemudahan akses layanan serta efisiensi proses administrasi. Namun demikian, indikator ketepatan sasaran serta optimalisasi input dan output masih belum optimal karena masih terdapat ketidaksesuaian antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri serta rendahnya partisipasi perusahaan dalam memanfaatkan sistem e-Makaryo. Ditinjau dari perspektif *e-government*, implementasi ini merupakan wujud nyata reformasi pelayanan publik digital. Berdasarkan kerangka evolusi *e-government* World Bank, Website

Aplikasi e-Makaryo telah melampaui fase Kehadiran (*Presence*) dan Interaksi (*Interaction*) secara optimal, serta berjalan efektif pada fase Transaksi (*Transaction*). Hal ini dibuktikan dengan antarmuka yang intuitif dan kemampuan mengeksekusi proses administrasi tanpa batas geografis (*borderless*). Namun, Website Aplikasi ini masih mengalami stagnasi pada transisi menuju fase Transformasi (*Transformation*). E-Makaryo baru sebatas memindahkan tumpukan berkas fisik menjadi data digital (*digitization*), tetapi belum mampu merombak pola kerja birokrasi menjadi instrumen intelijen pasar kerja yang terukur, terbukti dari absennya fitur pelacakan status lamaran dan dasbor serapan tenaga kerja secara *real-time*.

2. Efektivitas implementasi website aplikasi e-Makaryo dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong meliputi dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan layanan digital ketenagakerjaan, kemudahan akses layanan bagi masyarakat, serta adanya integrasi dengan beberapa sistem ketenagakerjaan lainnya. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem, kendala teknis seperti bug atau gangguan sistem pada proses layanan digital, serta masih rendahnya partisipasi perusahaan dalam memanfaatkan platform tersebut untuk mempublikasikan lowongan pekerjaan. Selain itu, koordinasi lintas instansi dan wilayah yang belum sepenuhnya optimal juga turut mempengaruhi efektivitas

implementasi website aplikasi e-Makaryo sebagai instrumen tata kelola ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, diketahui bahwa efektivitas e-Makaryo sebagai layanan tata kelola ketenagakerjaan digital masih bersifat operasional dan belum strategis. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh belum efektifnya indikator *compatibility* dan *result demonstrability*, serta dominannya faktor penghambat berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas daerah, dan rendahnya partisipasi perusahaan. Oleh karena itu, saran dalam penelitian ini disusun secara langsung sebagai tindak lanjut atas indikator dan faktor yang belum optimal, dengan melibatkan seluruh aktor dalam ekosistem penempatan tenaga kerja digital.

1. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, e-Makaryo perlu diposisikan secara lebih tegas sebagai instrumen kebijakan penempatan tenaga kerja berbasis data. Temuan mengenai belum efektifnya kesesuaian sistem dan keterlihatan hasil penempatan menunjukkan bahwa e-Makaryo belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi kebijakan ketenagakerjaan. Pemerintah provinsi perlu memastikan bahwa data hasil penempatan tenaga kerja yang dihasilkan melalui e-Makaryo terintegrasi dengan perencanaan dan evaluasi program ketenagakerjaan, sehingga Website Aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai media layanan, tetapi juga sebagai sumber informasi strategis dalam pengambilan keputusan.

2. Unit pengelola dan aparatur pelaksana e-Makaryo, efektivitas Website Aplikasi memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan manajerial. Keterbatasan sumber daya manusia pengelola dan tingginya beban kerja admin menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi layanan sangat bergantung pada kesiapan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang pembagian tugas, penambahan personel pengelola, serta peningkatan kapasitas SDM agar pengelolaan e-Makaryo dapat berjalan lebih responsif, akuntabel, dan berkelanjutan.
3. Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota, temuan mengenai lemahnya koordinasi lintas daerah menunjukkan perlunya penguatan peran sebagai simpul implementasi kebijakan di tingkat lokal. Dinas kabupaten/kota perlu dilibatkan secara lebih aktif dalam sosialisasi, pendampingan pengguna, serta pengumpulan dan pemutakhiran data ketenagakerjaan, sehingga implementasi e-Makaryo tidak terpusat di tingkat provinsi dan dapat berjalan lebih merata sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
4. Perusahaan sebagai penyedia lowongan pekerjaan, rendahnya tingkat partisipasi dalam pemanfaatan e-Makaryo menunjukkan bahwa dunia usaha belum sepenuhnya melihat Website Aplikasi ini sebagai sarana strategis rekrutmen tenaga kerja. Oleh karena itu, perusahaan perlu didorong untuk lebih aktif memanfaatkan e-Makaryo dengan menyediakan informasi lowongan yang jelas, realistis, dan diperbarui secara berkala. Keterlibatan perusahaan secara konsisten menjadi prasyarat utama agar e-Makaryo dapat menghasilkan penempatan tenaga kerja yang nyata dan berkelanjutan.

5. Masyarakat pencari kerja, temuan mengenai ketidaksesuaian data pelamar menunjukkan bahwa efektivitas e-Makaryo juga bergantung pada kualitas partisipasi pengguna. Pencari kerja perlu didorong untuk mengisi dan memperbarui data secara lengkap serta memanfaatkan Website Aplikasi secara aktif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, peran pemerintah tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai fasilitator literasi dan pendampingan pengguna menjadi sangat penting.

Dengan demikian, efektivitas e-Makaryo menuntut pendekatan tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, unit pengelola, perusahaan, dan masyarakat pencari kerja secara sinergis. Tanpa keterlibatan seluruh pihak tersebut, e-Makaryo berpotensi hanya berfungsi sebagai layanan administratif, bukan sebagai instrumen kebijakan penempatan tenaga kerja yang efektif dan berkelanjutan.